

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. Capaian Inflasi Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III 2021 mencapai 1,92 % (y on y), lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2020 dengan capaian sebesar 1,30 % (y on y), serta lebih tinggi dari capaian Triwulan II 2021 yang sebesar 1,19 % (y on y). Demikian juga, capaian inflasi Jawa Timur pada Triwulan III 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional 1,60 % (y on y). Jika dilihat lebih detail, dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang diukur maka sumbangan inflasi Jawa Timur dipengaruhi oleh tekanan pada 10 (sepuluh) kelompok pengeluaran yaitu; (1) kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 3,06%, (2) kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,02 %, (3) kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0,43%, (4) kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,76%, (5) kelompok Kesehatan 3,84%, (6) kelompok Transportasi 1,30%, (7) kelompok kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 1,33%, (8) kelompok pendidikan 2,58%, (9) kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 4,38%, (10) kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,75%. Sedangkan sumbangan deflasi terjadi pada 1 (satu) kelompok pengeluaran, yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,03 %.

b. Pada Triwulan III 2021, capaian inflasi Jawa Timur sesuai dengan ramalan/ prediksi TPID Provinsi Jawa Timur dengan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan pada Triwulan II 2021 tetapi masih berada pada rentang sasaran inflasi  $3 \pm 1\%$ . Peningkatan inflasi Jawa Timur disebabkan oleh kenaikan permintaan bahan makanan pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha serta kenaikan kelompok Pendidikan seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Selain itu tekanan inflasi sejalan dengan mulai pulihnya kinerja perekonomian pasca pemberlakuan PPKM Darurat sehingga terjadi peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier, seperti inflasi kelompok pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan sandang, pendidikan, dan transportasi. Meskipun demikian, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk memutus rantai penularan Covid-19 telah menahan tekanan inflasi Jawa Timur pada Triwulan III. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan PPKM Darurat bertujuan untuk menangani penularan varian Virus Delta yang sangat cepat. Penanganan pandemi Covid-19 dengan pembatasan mobilitas masyarakat yang efektif selama penerapan PPKM Darurat di Jawa Timur berhasil menjaga daya beli masyarakat sehingga tidak terjadi fenomena demand shock. Indikasi tersebut dapat dilihat dari tingkat inflasi Jawa Timur pada bulan Juli 2021 sebesar 0,17% (m to m).

c. Pada Triwulan III 2021, terjadi beberapa peristiwa kenaikan harga komoditas jagung yang merupakan bahan baku utama pakan ternak ayam petelur. Bahkan kenaikan harga jagung pakan ternak di Jawa Timur telah menjadi isu nasional disebabkan oleh adanya permohonan bantuan peternak kepada Presiden RI saat kunjungan ke Kabupaten Blitar melalui media poster. Langkah-langkah mitigasi dan responsif telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Jawa Timur, antara lain: □ Melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Stabilisasi Harga Telur di Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pada 15 September 2021, dengan hasil rekomendasi rapat antara lain; i. Segera dicarikan solusi jangka pendek yang cepat menstabilkan harga, sehingga menolong peternak di sisi hulu, dengan perlu segera menurunkan HPP Telur mencarikan alternatif stok/ supply jagung sebagai pakan ternak utama kepada sentra-sentra peternakan di Jawa Timur; ii. Melakukan inventarisir kawasan pertanian jagung potensial yang akan dijadikan sebagai penyangga utama kebutuhan jagung dalam Provinsi Jawa Timur yang akan dilaporkan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan arahan langsung terkait tindak lanjutnya; iii. Hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan melakukan intervensi, monitoring dan evaluasi kepada sentra industri peternakan telur di Kab/Kota Jawa Timur sampai harga menjadi stabil. □ Melaksanakan

Kunjungan ke Sentra Peternakan Telur Ayam Ras di Kabupaten Blitar Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pada 15 September 2021; □ Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis Kinerja Inflasi Jawa Timur Tahun 2021 dengan tema “Strategi Membantu Peternak Rakyat Memenuhi Kebutuhan Pakan Jagung Dengan Harga Wajar”, pada 17 September 2021, dengan rekomendasi : i. Penguatan permodalan di tingkat peternak dengan membentuk kelompok/ koperasi usaha bersama, sehingga meningkatkan kapasitas dalam membeli/menjangkau komoditas jagung saat surplus/ panen; ii. Peningkatan kapasitas peternak juga melalui pengembangan sarana dengan mempunyai tempat penyimpanan dan pengeringan Silo yang lebih efektif dan efisien dalam kapasitas besar untuk kedepan dapat didistribusikan secara lebih terencana terkait kebutuhan pakan jagung kepada anggotanya sehingga tidak terpengaruh fluktuasi harga; iii. Lebih menguatkan dan mengoptimalkan kerjasama antar daerah (surplus-minus) komoditas jagung dalam menjaga agar permasalahan disparitas/fluktuasi harga dapat tereduksi; □ TPID Jawa Timur ikut mengusulkan rekomendasi sampai dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, tanggal 24 September 2021, Nomor:510/21264/125.1/2021, perihal Membeli Telur Ayam Dari Peternak Jawa Timur; □ TPID Jawa Timur ikut mengusulkan rekomendasi sampai dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tanggal 30 September 2021, Nomor:B-30002/TU.020/F2.5/09/2021, perihal Data Peternak Calon Penerima Bantuan Jagung Pakan. d. Inflasi Jawa Timur pada Triwulan IV 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan III 2021 yang sejalan dengan penerapan kebijakan PPKM berdasarkan level yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri RI berdasarkan assesmen Kementerian Kesehatan RI dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Sesuai hasil asesmen yang dirilis di website Kementerian Kesehatan RI tanggal 25 September 2021, sebanyak 32 dan 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur berstatus level 1 dan 6 kabupaten/kota berstatus level 2. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri, pemberlakuan PPKM bagi daerah level 1 dapat mengurangi pembatasan mobilitas masyarakat seperti pekerja non esensial 75% dan sector esensial 100% penerapan WFO jika sudah divaksin, pemberlakuan kapasitas sebesar 75% untuk toko, pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 50% serta pembukaan destinasi tujuan wisata (DTW) secara bertahap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Keberhasilan pencapaian status PPKM menjadi level 1 tentunya akan berdampak pada pulihnya daya beli masyarakat dan mendorong permintaan barang/jasa masyarakat. e. Dengan wacana dan isu penting tersebut, maka TPID Provinsi Jatim perlu mewaspadaai peningkatan inflasi dampak pemulihan ekonomi Jawa Timur. Pulihnya daya beli masyarakat yang mendorong permintaan masyarakat terutama terhadap barang konsumtif (sisi demand), harus diwaspadai terkait ketersediaan pada sisi produksi (sisi supply). Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nusantara berbagai komoditas strategis. Belum pulihnya permintaan domestik maupun internasional juga berpotensi mengakibatkan terjadinya over-supply atau over-stock karena masih terbatasnya mobilitas masyarakat dan belum pulihnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 di luar provinsi Jawa Timur. Pada kelompok Volatile Food sebagai penyumbang utama inflasi/ deflasi di Jawa Timur dapat diidentifikasi dengan gambaran penurunan inflasi tanaman hortikultura yang terjadi pada beberapa komoditas sejalan dengan penurunan harga yang didorong oleh melimpahnya stok pasca panen raya di beberapa kabupaten sentra produksi, kondisi cuaca/ seasonal yang relatif kondusif dengan curah hujan yang rendah hingga sedang di sentra produksi turut mempengaruhi keberhasilan produksi di sisi hulu. Ketersediaan tersebut juga ditopang dengan melimpahnya stok produk peternakan (daging/telur) di tengah permintaan masyarakat yang masih terbatas mendukung rendahnya tekanan inflasi pada komoditas pangan stretegis tersebut. f. Inflasi inti (core), diperkirakan

cenderung tetap bahkan tidak mengalami gejolak berarti karena masih lambatnya pemulihan tren peningkatan aktivitas ekonomi global dan domestik pada tahun 2021. Harga minyak dunia terpantau mengalami peningkatan pada Juni 2021 dan berpotensi mengalami tren peningkatan sepanjang tahun 2021. Hal tersebut terutama didorong oleh peningkatan permintaan sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi seiring dengan vaksinasi Covid-19 secara global yang turut mempengaruhi distribusi minyak dunia. Kendati demikian, transmisi kenaikan harga minyak global diperkirakan masih relatif terbatas. Sementara itu tren perbaikan ekonomi global masih belum terlihat optimal di sektor riil, Peningkatan harga emas dunia didorong oleh melemahnya Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia, risiko peningkatan inflasi, serta tingkat suku bunga global yang lebih rendah pada Triwulan III 2021. Hal tersebut mendorong investor untuk merealokasikan asetnya dari aset riil ke komoditas emas yang merupakan aset safe haven. Lebih lanjut, inflasi inti yang rendah tidak terlepas dari pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar dan harga komoditas global yang terjaga, serta konsistensi berbagai bauran kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengarahkan pembentukan ekspektasi inflasi di masyarakat. g. Sedangkan kelompok inflasi dari harga yang diatur pemerintah (administered price) pada Triwulan IV mendatang akan diprediksi cenderung tetap/ stagnan dibandingkan dengan Triwulan III ini. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh implementasi penurunan tarif untuk pelanggan listrik golongan rendah non subsidi per 1 Oktober 2020 masih berlaku hingga akhir tahun 2021 turut diperkirakan menjadi faktor penahan eskalasi tekanan inflasi yang lebih tinggi pada sub kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar. h. Inflasi paling umum disebabkan oleh ketidakseimbangan antara sisi demand dan sisi supply. Untuk menjaga keseimbangan demand dan supply, diperlukan untuk menjaga rantai distribusi pasokan pada komoditas strategis yang menjadi penyumbang utama inflasi dengan mamaksimalkan fungsi intermediary supply-demand melalui lembaga yang telah diberikan keleluasaan peran stabilisasi harga dengan penugasan oleh Kepala Daerah selaku Ketua TPID. Disamping menjaga ketersediaan pasokan, proses keterjangkauan harga dapat tercapai melalui kelancaran distribusi yang juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dan mendapatkan prioritas pada program unggulan TPID, karena seringkali pasokan yang melimpah di wilayah produsen/surplus, tidak dapat terdistribusikan secara tepat di wilayah konsumen/minus. Peran TPID sangat vital dalam mengendalikan kenaikan tarif yang mungkin terjadi di masa menjelang HBKN (di TW III, ada event Idul Adha) yang berpotensi terjadinya kenaikan tarif transportasi/ angkutan penumpang akibat peningkatan mobilitas penduduk. Peran lainnya adalah memenatai serta memberikan rekomendasi/pertimbangan kepada Pemerintah Pusat terkait penetapan kenaikan tarif komoditas di dalam administered price seperti (BBM, Tarif Listrik, Tarif Air Minum dan sebagainya).

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data Berita Rilis Statistik (BRS) Inflasi oleh BPS kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi terbesar pada tahun kalender Triwulan III 2021 antara lain pada (1) kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,38% (y to d), (2) kelompok Kesehatan 2,72% (y to d), dan (3) kelompok Pendidikan sebesar ,54% (y to d). Jika dilihat secara bulanan komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Timur pada bulan bulan Juli antara lain: Cabai Rawit 0,08% (m to m), Bawang Merah 0,02% (m to m), Sekolah Dasar 0,02% (m to m), pada bulan Agustus antara lain: Akademi/PT 0,09% (m to m), Minyak Goreng 0,03% (m to m), Tomat 0,03% (m to m), dan pada bulan September antara lain: Daging Ayam Ras 0,04% (m to m), Minyak Goreng 0,02% (m to m), Sop 0,01% (m to m). Pada Triwulan IV 2021, inflasi Jawa Timur diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2021 namun masih

dalam rentang sasaran inflasi 3+1% (y on y). Hal tersebut sejalan dengan efektivitas pembatasan mobilitas masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui kebijakan PPKM Jawa Timur yang saat ini telah berstatus daerah level 1. Jika pemberlakuan PPKM berstatus level 1 di Jawa Timur diberlakukan pada Triwulan IV 2021 ini diperkirakan dapat memulihkan daya beli masyarakat yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi yang tentunya juga dapat meningkatkan permintaan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2021. Meskipun demikian, di sisi penawaran terdapat beberapa komoditas hortikultura diperkirakan akan memiliki pasokan lebih dampak masa panen komoditas tersebut pada Triwulan IV 2021 yang akan menjadi faktor penahan inflasi Jawa Timur. Sedangkan pada sisi permintaan, beberapa komoditas bahan pangan diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan sejalan dengan momen HBKN Nataru (Natal dan Tahun Baru), khususnya pada komoditas bahan makanan, terutama telur, daging dan bumbu-bumbuan. Terjaganya stok bahan pangan strategis, penyelenggaraan pasar murah menjelang HBKN, serta potensi penurunan inflasi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar lainnya diharapkan dapat menahan laju inflasi Jawa Timur. Hingga akhir 2021, Pemerintah tetap memberikan stimulus keringanan berupa diskon tarif tenaga listrik bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Diskon tarif tenaga listrik sebesar 50% diberlakukan untuk golongan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), golongan bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan golongan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA). Diskon tarif tenaga listrik sebesar 25% untuk golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA). Pembebasan biaya beban atau abonemen sebesar 50% untuk golongan sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA, golongan bisnis dan industri daya 900 VA. Selain itu, belum terdapat rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, diperkirakan menjadi faktor penahan tekanan inflasi yang lebih tinggi sampai akhir tahun 2021. Sedangkan penyesuaian harga rokok secara bertahap oleh pelaku usaha sejalan dengan kenaikan harga cukai rokok oleh pemerintah pusat sebesar 12,5% sampai akhir 2021. Hal tersebut diperkirakan turut menjadi pendorong peningkatan inflasi pada Triwulan IV 2021.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi TPID Provinsi di Jawa Timur pada Triwulan III 2021 tetap terfokus pada strategi roadmap 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif). Untuk menjaga sasaran inflasi sesuai dengan target  $3\pm 1\%$  sampai dengan akhir tahun 2021, pada pada kuartal ini telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengacu strategi 4K untuk pengendalian inflasi yang antara lain: a. Ketersediaan Pasokan, 1) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo didampingi oleh Forkopimda Jatim pada kegiatan "Merdeka Ekspor" di Surabaya, di Terminal Peti Kemas - Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dalam acara tersebut dilepas ekspor komoditas pertanian yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses serentak di 17 pintu ekspor se-Indonesia sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional di masa pandemi Covid-19, sekaligus untuk memperingati HUT Ke-76 RI. Pada kesempatan ini Jawa Timur menyumbang ekspor Rp1,3 triliun ke sejumlah negara, pada tanggal 14 Agustus 2021; 2) Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pengawasan Peredaran Benih Porang, dalam peraturan tersebut terkait larangan ekspor katak porang ke luar negeri serta untuk melindungi para petani porang, Larangan ekspor tersebut diberlakukan karena banyak bibit atau katak porang yang dijual ke luar negeri, diburu banyak negara yang beriklim tropis untuk dibudidayakan. Umbi porang ini banyak digunakan untuk keperluan makanan hingga bahan-bahan kosmetik; 3) Gubernur Jawa Timur memerintahkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Monitoring Stok Pangan

Strategis Tahun 2021, dengan 10 (sepuluh) komoditas pangan strategis yang perlu untuk dimonitor antara lain; beras, cabe besar, cabe rawit, jagung, gula, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging sapi dan daging ayam. Monitoring stok pangan strategis merupakan kegiatan yang menyediakan data stok pangan strategis secara berkala (mingguan) sebagai bahan rekomendasi kebijakan intervensi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit pangan, pada tanggal 22 September 2021; b. Keterjangkauan Harga 1) Gubernur Jawa Timur memerintahkan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif untuk Pengawasan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di Jawa Timur, kegiatan mulai dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 29 September 2021; 2) Gubernur Jawa Timur memerintahkan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penyerapan telur dan pendistribusian telur untuk membantu peternak dalam pemasaran telur dan menyelamatkan peternak dari keterpurukan akibat jatuhnya harga telur, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2021; 3) Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 510/2855/125.1/2021, tentang Membeli Cabai Dari Petani Jawa Timur, upaya ini dilakukan untuk menolong petani dari turunnya harga cabai dan melimpahnya stok dipasaran sebagai dampak PPKM dan bersamaan dengan panen raya di beberapa sentra produksi, pada tanggal 31 Agustus 2021; 4) Sekretaris Daerah Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 510/2856/125.1/2021, tentang Membeli Cabai Dari Petani Jawa Timur, upaya ini dilakukan tindak lanjut dari SE Gubernur Jawa Timur, pada tanggal 31 Agustus 2021; 5) Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 510/21264/125.1/2021, tentang Membeli Telur Ayam Dari Peternak Jawa Timur, upaya ini dilakukan untuk menolong peternak dari turunnya harga telur ayam dan melimpahnya stok dipasaran sebagai dampak PPKM dan peningkatan produksi telur di beberapa sentra peternakan ayam, pada tanggal 24 September 2021; 6) Gubernur Jawa Timur menghadiri peluncuran Pondok Kurasi dan Gerai Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Surabaya untuk mendorong perluasan pemasaran produk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Jawa Timur, pada tanggal 24 September 2021; 7) Gubernur Jawa Timur memerintahkan TPID Jawa Timur ikut mengusulkan rekomendasi sampai dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tanggal 30 September 2021, Nomor:B-30002/TU.020/F2.5/09/2021, perihal Data Peternak Calon Penerima Bantuan Jagung Pakan; 8) c. Kelancaran Distribusi 1) Gubernur Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan dalam rangka pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19; 2) Gubernur Jawa Timur menghadiri Launching Penggunaan Smartcard dan Cashless Transaction Bus AKDP dalam menunjang optimalisasi kinerja angkutan jalan di Jawa Timur; bertempat di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 29 September 2021; d. Komunikasi Efektif 1) Gubernur Jawa Timur bersama Forkopimda Jawa Timur meninjau pelaksanaan PPKM Darurat, bertempat di Kota Surabaya untuk memastikan bahwa pemberlakuan PPKM Darurat berjalan secara efektif sehingga dapat segera memulihkan daya beli masyarakat, pada tanggal 6 Juli 2021; 2) Gubernur Jawa Timur menghadiri penyerahan TPID Award 2021 di Surabaya. Pada kesempatan tersebut Ibu Gubernur mendapatkan penghargaan atas prestasi Provinsi Jawa Timur menjadi Nominasi Terbaik TPID Provinsi se-Jawa Bali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Dalam Sambutannya, Ibu Gubernur menekankan bahwa tujuan diselenggarakan TPID Award adalah untuk memotivasi TPID dalam upaya menjaga inflasi untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya ditengah pademi Covid-19, pada tanggal 14 September 2021; 3) Gubernur Jawa Timur Provinsi Jawa Timur menugaskan sekretariat TPID Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur. Dalam

pertemuan tersebut dibahas risiko inflasi yang dapat terjadi sebagai dampak PPKM Darurat serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memitigasi risiko inflasi Jawa Timur, pada 8 Juli 2021; 4) Gubernur Jawa Timur memerintahkan sekretariat TPID melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis Kinerja Inflasi Jawa Timur Tahun 2021 dengan tema “Strategi Membantu Peternak Rakyat Memenuhi Kebutuhan Pakan Jagung Dengan Harga Wajar”, pada 17 September 2021; 5) Gubernur Jawa Timur memerintahkan melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Stabilisasi Harga Telur di Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pada 15 September 2021 yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan kunjungan ke Sentra Peternakan Telur Ayam Ras di Kabupaten Blitar Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; 6) Gubernur Jawa Timur memberikan arahan untuk melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Studi Banding/Benchmark ke TPID Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Peraih Penghargaan TPID Award 2021 kategori tingkat Provinsi Jawa-Bali. Kunjungan kerja (studi banding) ke TPID DI Yogyakarta merupakan langkah untuk gerak cepat sekretariat TPID Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan tiga aspek (proses, output, outcome) yang dibutuhkan dalam penilaian TPID Awards di Tahun 2022 mendatang, selain itu untuk lebih terorganisirnya penyusunan Laporan TPID dan khususnya memperbaiki aspek proses laporan yang selama ini kurang maksimal di Jawa Timur, pada tanggal 23 s.d 25 September 2021;

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh TPID Provinsi Jawa Timur pada periode Triwulan III 2021 telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut tercermin dari terjaganya tingkat inflasi di Jawa Timur yang berada pada level yang rendah dan stabil sebesar 1,92 % (y on y), dan diatas capaian inflasi Nasional yang sebesar 1,60% (y on y). Tantangan pengendalian inflasi pada Triwulan III 2021 lebih kepada pengendalian harga yang turun atau terjadinya deflasi pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, pada sub kelompok makanan seperti Telur Ayam Ras, Cabai Rawit karena pengaruh PPKM Darurat yang bersamaan dengan adanya panen raya disektor pertanian hortikultura serta limbah produksi disektor peternakan. Dalam menghadapi sejumlah masalah pengendalian harga komoditas TPID Provinsi Jawa Timur memperkuat strategi 4 K melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID-P, rapat teknis dan rapat koordinasi, aktivitas pengendalian harga di lapangan seperti sidak, kunjungan lapangan, dan pemantauan harga, serta pengoptimalan teknologi informasi melalui aplikasi <https://jaimreport.jatimprov.go.id/>, [www.siskaperbapo.com](http://www.siskaperbapo.com), dan [www.poskodigitalatsatgaspangan.net](http://www.poskodigitalatsatgaspangan.net) dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat melalui PPKM Darurat sangat berdampak pada proyeksi laju inflasi (menuju ke deflasi). Kondisi pembatasan mobilitas masyarakat yang berdampak pada penurunan aktifitas perekonomian yang pada akhirnya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Namun dengan efektivitas penerapan kebijakan PPKM Darurat di Jawa Timur pada bulan Juli 2021 berdampak pada percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat Jawa Timur sehingga pada bulan Juli 2021 inflasi bulanan Jawa Timur sebesar 0,14% (m to m). Berdasarkan hasil asesmen Kementerian Kesehatan RI, pada tanggal 25 September 2021, yang menetapkan bahwa 32 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menerapkan PPKM berstatus level 1 dan 6 Kabupaten/Kota menerapkan PPKM berstatus level 2 membuat aktivitas perekonomian menjadi meningkat sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang berdampak pada pemulihan daya beli masyarakat Jawa Timur. TPID-P Jawa Timur berharap pemulihan ekonomi pada Triwulan IV 2021 disertai dengan tingkat inflasi yang terjaga sesuai dengan rentang yang telah ditetapkan sebesar 3+1%.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan isu utama masalah keseimbangan supply-demand pada kelompok volatile food. Penurunan permintaan akibat pembatasan kegiatan masyarakat namun produksi on farm yang tetap perlu mendapatkan perhatian lebih, hal tersebut mengingat Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional, maka motivasi produksi petani dan UMKM Jawa Timur harus tetap terjaga di tengah penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perlu disusun strategi antara lain: a. Program ketersediaan pasokan dan stabilisasi pada berbagai komoditas bahan makanan pangan strategis; b. Edukasi dan sosialisasi diversifikasi bahan pangan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; c. Monitoring ketersediaan stok dan pergerakan harga komoditas pangan utama secara intensif; d. Menjaga kontinuitas pasokan dengan optimalisasi penggunaan kalender tanam; e. Penyerapan supply berbagai komoditas strategis yang melimpah pada saat panen raya untuk kebutuhan bansos/ BPNT; f. Kerjasama antar daerah untuk komoditas strategis sebagai contoh jagung pipilan sebagai bahan dasar pakan ternak; g. Monitoring perkembangan cuaca/iklim melalui koordinasi dengan BMKG memanfaatkan teknologi digitalisasi pertanian dan mensosialisasikan kepada para petani setempat; h. Penurunan disparitas harga antara provinsi dengan penguatan manajemen distribusi komoditas bahan pokok dan integrasi logistic; i. Peningkatan peran Kerjasama Perdagangan Daerah (KPD) dalam penguatan distribusi dan konektivitas; j. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data perkembangan harga (PIHPS dan SISKAPERBAPO); k. Terimplementasinya Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP); l. Pemanfaatan Early Warning System (EWS-Data Statistik Pertanian, Data Harga, Data Ketersediaan Stock) komoditi strategis sebagai dasar untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi resiko inflasi/deflasi. Sebagai contoh pengoptimalan aplikasi <https://jaimreport.jatimprov.go.id/> yang telah disusun oleh Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur selaku sekretariat TPID Provinsi Jawa Timur.